

E-Procurement Dan Tata Kelola Digital: E-katalog Indonesia Dan Peran '*Digital Human*' Dalam Transformasi Layanan Publik Kota Serang

Razaq Herawan, Ahmad Daelami, Riswanda

MAP FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

7775250028@student.untirta.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital mendorong transformasi tata kelola pemerintahan, termasuk dalam pengadaan barang/jasa publik. Artikel ini membahas peran e-procurement — khususnya implementasi e-katalog di Indonesia — sebagai pilar tata kelola pemerintahan digital untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Kajian literatur menunjukkan e-procurement berkontribusi pada pencegahan kecurangan melalui peningkatan keterbukaan informasi, pencatatan digital, dan jejak audit, sehingga memperkuat prinsip good governance (Mazta et al., 2025). Namun, keberhasilan implementasi bergantung pada kesiapan infrastruktur, dukungan regulasi, kompetensi SDM digital, serta komitmen organisasi dalam mengatasi kesenjangan digital (Untung et al., 2025). Dengan merujuk pada kebijakan SPBE dan kerangka regional ASEAN, artikel ini menegaskan bahwa integrasi e-procurement perlu diimbangi penguatan kapasitas manusia dan tata kelola data yang adaptif agar transformasi digital menghasilkan pemerintahan yang akuntabel, terpercaya, dan berorientasi pelayanan (ASEAN, 2021; Kementerian PANRB, 2018, 2022).

Kata kunci: *e-procurement*; *e-katalog*; tata kelola digital; *good governance*; transformasi digital; SDM digital

ABSTRACT

The development of digital technology is driving the transformation of government governance, including in the procurement of public goods and services. This article discusses the role of e-procurement—specifically the implementation of e-catalogs in Indonesia—as a pillar of digital governance to increase transparency, accountability, and efficiency. A literature review shows that e-procurement contributes to fraud prevention through increased information transparency, digital record-keeping, and audit trails, thereby strengthening the principles of good governance (Mazta et al., 2025). However, successful implementation depends on infrastructure readiness, regulatory support, digital human resource competency, and organizational commitment to addressing the digital divide (Untung et al., 2025). Referring to the SPBE policy and the ASEAN regional framework, this article emphasizes that e-procurement integration needs to be balanced with human capacity building and adaptive data governance so that digital transformation results in an accountable, trustworthy, and service-oriented government (ASEAN, 2021; Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform, 2018, 2022).

Keywords: *e-procurement; e-catalog; digital governance; good governance; digital transformation; digital human resources*

1. PENDAHULUAN

Digitalisasi sektor publik menjadi agenda strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan responsif (Untung et al., 2025). Salah satu area berisiko tinggi yang menjadi prioritas transformasi digital ialah pengadaan barang/jasa pemerintah. Reformasi pengadaan melalui e-procurement dipahami sebagai instrumen tata kelola yang berpotensi menekan peluang korupsi/kolusi melalui transparansi proses, standar prosedur, dan pelacakan transaksi (**Mazta et al., 2025**).

Di sisi lain, penguatan tata kelola digital membutuhkan kerangka analisis kebijakan yang tidak berhenti pada aspek prosedural, tetapi juga mendorong literasi kebijakan yang bersifat praksis agar aktor kebijakan mampu menelaah ragam isu dan konsekuensi implementasinya secara kritis (**Riswanda, 2023**). Selain itu, pengambilan keputusan kebijakan perlu dibaca sebagai proses yang dinamis—berisi tarik-menarik gagasan, kepentingan, dan argumentasi—sehingga membutuhkan nalar kritis dalam memahami dialektika kebijakan dan arah pandang kebijakan yang berkembang (**Riswanda, 2024**).

Di Indonesia, penguatan pemerintahan digital ditopang kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mendorong integrasi layanan dan data lintas instansi (**Kementerian PANRB, 2018, 2022**). Pada tataran regional, ASEAN Digital Masterplan 2025 menekankan peningkatan kualitas layanan e-government sekaligus inklusi digital (**ASEAN, 2021**). Kerangka ini relevan bagi penguatan e-procurement, khususnya e-katalog, sebagai kanal e-purchasing yang semakin luas digunakan.

Peluncuran e-Katalog Versi 6 atau e-Katalog V6 menandai babak baru dalam digitalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia. Seperti yang diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia pada 10 Desember 2024, e-Katalog V6 bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas kegiatan pengadaan mulai 1 Januari 2025. Versi ini mencakup keuntungan yang signifikan, seperti integrasi penuh dari pemesanan hingga pembayaran. Dengan fitur-fitur ini, pemeriksaan digital dan audit waktu nyata dapat terintegrasi dengan lancar dengan sistem SAKTI Kemenkeu dan SIPD Kemendagri.

Peraturan yang lebih mengatur, seperti Surat Edaran Kepala LKPP No. 9 Tahun 2024 dan Surat Edaran Bersama No. 1 Tahun 2025, memperkuat pelaksanaan e-Katalog V6 di seluruh pemerintah daerah. Di dalam e-Katalog V6, terdapat komitmen bersama untuk menurunkan biaya pengeluaran hingga 20-30 persen, penghapusan korupsi, serta memperbaiki kebijakan pengeluaran pemerintah berbasis data. Namun, ada masalah di tengah masyarakat yang menghambat sistem ini untuk berfungsi dengan maksimal. Masalah seperti minimnya kesiapan infrastruktur, ketakutan terhadap inovasi, serta kurangnya pemahaman teknis oleh penyedia dan lembaga daerah.

2. METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui tinjauan pustaka. Sumber ditarik dari artikel jurnal, laporan kebijakan, modul pelatihan sektor publik, dan buku yang relevan dengan e-procurement, digital governance, dan transformasi digital. Sintesis dilakukan dengan membandingkan temuan lintas sumber untuk membangun argumentasi konseptual mengenai kontribusi e-procurement terhadap prinsip good governance dan faktor-faktor penentu keberhasilannya **(ASEAN, 2021; Mazta et al., 2025; Untung et al., 2025)**.

Untuk menjaga ketertelusuran argumentasi, proses analisis literatur mengikuti prinsip transparansi langkah analisis dan keteraturan prosedur dalam membaca data kebijakan, termasuk penggunaan perspektif interpretatif ketika diperlukan untuk memahami konteks, aktor, dan dinamika kebijakan **(Riswanda, 2024)**. Dengan demikian, pembahasan tidak hanya mengompilasi temuan, tetapi juga menata alasan konseptual di balik pemilihan konsep dan keterkaitannya dengan fenomena e-procurement/e-katalog.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi E-Katalog Versi 6 di Kota Serang

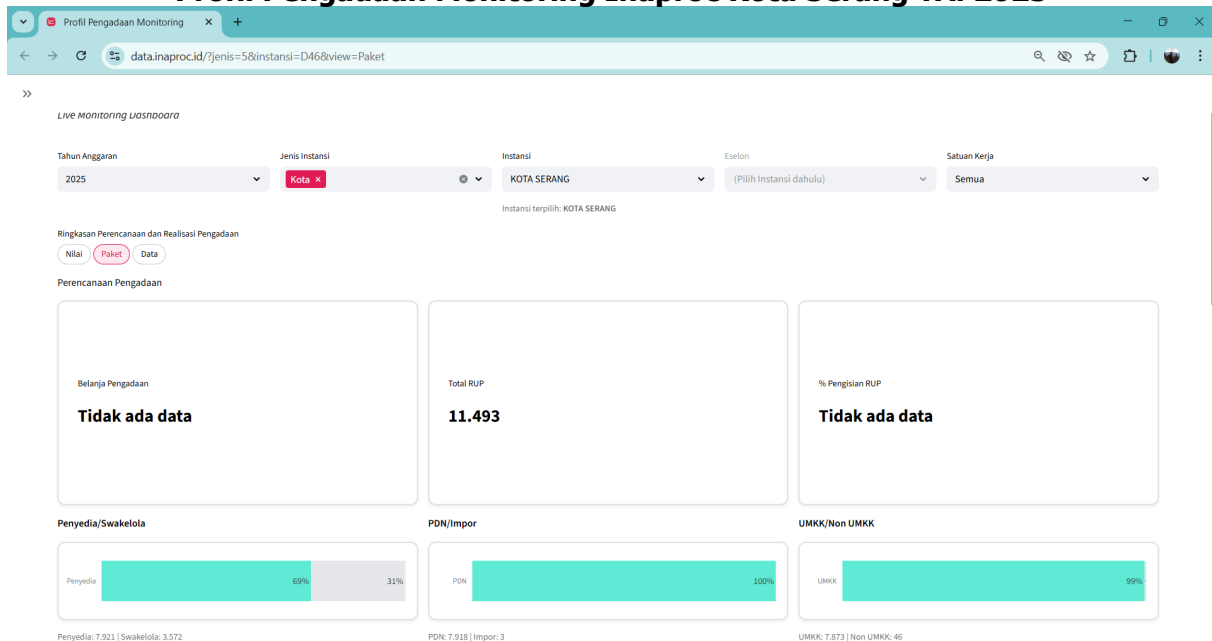
E-Katalog Versi 6 merupakan sebuah terobosan signifikan dan evolusi dari platform pengadaan barang/jasa pemerintah elektronik yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Lebih dari sekadar pembaruan tampilan, versi ini dirancang secara komprehensif untuk menjawab tantangan pengadaan modern dengan menciptakan ekosistem belanja negara yang lebih efisien, transparan, akuntabel, dan berpusat pada pengguna (user-centric).

Platform ini hadir dengan antarmuka pengguna (UI/UX) yang sepenuhnya didesain ulang, mengadopsi prinsip-prinsip e-commerce terkini untuk memberikan pengalaman yang lebih intuitif dan mudah dinavigasi. Dashboard terintegrasi menyajikan data dan analitik real-time, memungkinkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan para pemangku kepentingan lainnya untuk mengambil keputusan yang lebih cepat dan berbasis data. Proses alur belanja, mulai dari pencarian produk, perbandingan, hingga pembuatan Surat Pesanan Elektronik (SPE), disederhanakan untuk memangkas waktu transaksi dan mengurangi potensi kesalahan.

Melalui sejumlah fitur unggulannya, E-Katalog Versi 6 memperkuat integrasi sistem dengan layanan pengadaan lainnya, seperti Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP), sehingga penilaian terhadap vendor menjadi lebih objektif dan terukur. Fitur pencarian yang lebih canggih dengan filter detail memudahkan pengguna untuk menemukan produk yang sesuai spesifikasi kebutuhan. Tak kalah penting, platform ini secara khusus dirancang untuk memperkuat peran UMKM sebagai bagian vital dari perekonomian nasional, dengan menyediakan akses pasar yang lebih luas dan proses yang lebih adil.

Secara keseluruhan, E-Katalog Versi 6 adalah wujud komitmen pemerintah dalam melakukan transformasi digital di sektor pengadaan. Bagi sektor pemerintah, ini adalah alat untuk mengoptimalkan anggaran dan meningkatkan akuntabilitas publik. Sementara itu, bagi para penyedia barang dan jasa, ini merupakan gerbang menuju pasar yang transparan, kompetitif, dan dapat diakses dengan lebih mudah. Dengan demikian, E-Katalog Versi 6 tidak hanya mempercepat proses belanja, tetapi juga membangun fondasi bagi tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan modern.

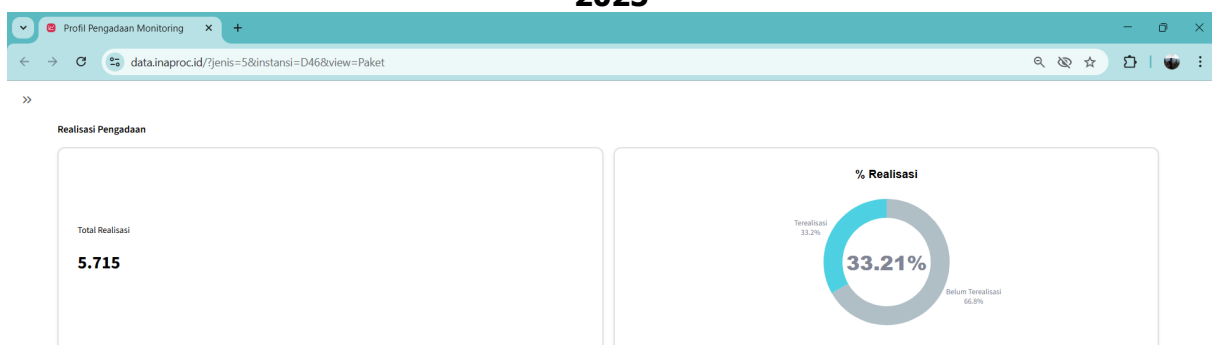
Gambar 1.
Profil Pengadaan Monitoring Inaproc Kota Serang TA. 2025



Sumber : <https://data.inaproc.id/?jenis=5&instansi=D46&view=Paket>

Sebanyak 11.493 total Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang tercantum dalam dashboard Inaproc Kota Serang, dimana diantaranya sebanyak 7.921 (69%) adalah penyedia dan 3.572 (31%) pengadaan secara swakelola. Kategorisasi barang yang ditampilkan sebanyak 7.918 berupa PDN dan sebanyak 3 barang yang merupakan barang impor. Dashboard ini juga menampilkan sebanyak 7.873 penyedia yang merupakan UMKK dan sisanya sebanyak 46 non UMKK.

Gambar 2.
Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa yang tertera di Inaproc Kota Serang TA. 2025



Sumber : <https://data.inaproc.id/?jenis=5&instansi=D46&view=Paket>

Sampai dengan bulan Januari 2026, realisasi pengadaan yang terdata di dalam dashboard Inaproc Kota Serang sebanyak 5.715, dengan capaian terealisasi sebanyak 33,2% dan sisanya sebanyak 66,8% belum terealisasi. Hal ini memperlihatkan bagaimana efektifitas dan juga efisiensi pengadaan barang dan jasa bisa mempercepat proses dari pengadaan barang dan jasa yang selama ini masih terhitung lambat sebelumnya.

3.2. *E-procurement* sebagai pilar *good governance*

E-procurement berkontribusi pada prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui digitalisasi proses, keterbukaan data, dan ketersediaan jejak audit yang dapat ditelusuri (**Mazta et al., 2025**). Literatur menunjukkan e-procurement berasosiasi dengan penurunan peluang kecurangan ketika sistem disertai prosedur yang jelas dan pengawasan yang memadai (**Mazta et al., 2025**). Digitalisasi juga memperkecil ruang negosiasi informal dan memudahkan audit berbasis data, sehingga memperkuat integritas tata kelola pengadaan (**Mazta et al., 2025**).

Namun, penguatan tata kelola tidak cukup dipahami sebagai kepatuhan teknis. Proses kebijakan dan implementasinya perlu dibaca sebagai dialektika—yang menuntut nalar kritis agar aktor kebijakan mampu membedakan substansi kebijakan dari ‘drama’ politik atau bias keputusan (**Riswanda, 2024**). Kerangka nalar kritis ini memperkuat argumen bahwa e-procurement yang efektif membutuhkan kombinasi antara sistem, manusia, dan tata kelola yang konsisten.

3.3. Peran ‘*digital human*’ dan kapasitas SDM

Keberhasilan transformasi digital ditentukan oleh interaksi teknologi–organisasi–manusia. Transformasi tidak hanya membutuhkan sistem, tetapi juga kompetensi digital aparatur, kepemimpinan, budaya kerja adaptif, dan tata kelola perubahan. Perspektif ‘digital human’ menempatkan perspektif manusia tetap menjadi pengarah nilai, pengambil keputusan, dan pengendali risiko dalam organisasi digital (**Skinner, 2018**). Penguatan literasi kebijakan yang berbasis praksis menjadi penting agar aparatur tidak sekadar menjalankan prosedur digital, tetapi juga mampu membaca konsekuensi implementasi, dilema kepentingan, dan dampak kebijakan pada publik (**Riswanda, 2023**).

Selain itu, nalar kritis diperlukan untuk memahami dialektika kebijakan yang terjadi dalam reformasi tata kelola digital—termasuk saat mengubah proses manual ke digital, menata ulang relasi kuasa, dan menetapkan standar baru dalam akuntabilitas (**Riswanda, 2024**). Dengan demikian, investasi pada SDM tidak hanya soal pelatihan aplikasi, tetapi juga penguatan cara bernalar, cara membaca konteks, dan cara mengevaluasi kebijakan secara argumentatif (**Hendytio, 2021; Riswanda, 2024**).

4. KESIMPULAN

E-procurement—termasuk e-katalog—berperan dalam penguatan good governance melalui transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi (**Mazta et al., 2025**). Namun, capaian tersebut sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, kapasitas SDM, komitmen integritas organisasi, serta integrasi tata kelola digital yang didorong SPBE (**ASEAN, 2021; Kementerian PANRB, 2018, 2022; Untung et al., 2025**). Penguatan e-katalog juga memerlukan strategi yang menysasar hambatan implementasi, termasuk dukungan untuk UMKM, penyederhanaan prosedur, dan pemerataan akses digital (**ASEAN, 2021; Suryani et al., 2025**).

Di luar aspek teknis, keberlanjutan reformasi pengadaan digital membutuhkan penguatan kapasitas analitis aparatur dan literasi kebijakan agar implementasi tidak berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi juga mampu membaca konsekuensi kebijakan, dinamika aktor,

serta risiko tata kelola dalam praktik **(Riswanda, 2023; Riswanda, 2024)**. Selain itu, penataan kebijakan dan evaluasi program digital perlu didukung transparansi langkah analisis dan pendekatan interpretatif untuk memahami konteks, makna, dan dinamika kebijakan yang mengiringi transformasi digital **(Riswanda, 2024)**. Dengan menempatkan “digital human” sebagai pusat transformasi, integrasi teknologi–proses–manusia berpeluang menghasilkan layanan publik yang lebih efektif, terpercaya, dan inklusif **(Skinner, 2018; Untung et al., 2025)**.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Bapak Leo Agustino, Ph.D sebagai Dekan FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk bimbingan, masukan kritis, dan dukungan yang tak ternilai sepanjang penelitian ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan di Magister Administrasi Publik FISIP universitas Sultan Ageng Tirtayasa atas diskusi yang konstruktif dan bantuan teknisnya.

DAFTAR RUJUKAN

- ASEAN. (2021). *ASEAN digital masterplan 2025*. ASEAN Secretariat.
- Hendytio, M. K. (2021). Modul strategi komunikasi organisasi sektor publik: Pelatihan kepemimpinan administrator. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2022). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). Laporan tahunan 2024: Statistik penindakan kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2021). Modul akuntabilitas kinerja: Pelatihan kepemimpinan administrator. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2021). Modul manajemen risiko: Pelatihan kepemimpinan administrator. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2021). Modul organisasi digital: Pelatihan kepemimpinan administrator. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Mazta, M. T., Gamayuni, R. R., & Prasetyo, T. J. (2025). *E-procurement as a pillar of good governance: A literature review of fraud prevention efforts in the public sector. Research of Economics and Business*, 1(2), 108–117.
- Riswanda. (2023). Menerapkan literasi kebijakan publik: Seri tembakau, narkoba, pornografi, dan perdagangan orang. Madza Media.
- Riswanda. (2024). Menafsirkan paradigma penelitian kebijakan publik. CV Sintesia.
- Riswanda. (2024). Nalar kebijakan: Bernalar kritis dalam sebuah dialektika kebijakan. CV Sintesia.
- Skinner, C. (2018). *Digital human: The fourth revolution of humanity includes everyone*. John Wiley & Sons.
- Suryani, I., Surendro, K., & Purwanda, D. (2025). Evaluasi kebijakan *e-purchasing* dalam pengadaan barang/jasa di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Sosioedukasi*, 14(3), 202–209.

- UNESCO, & Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). Indonesia artificial intelligence readiness assessment report. UNESCO.
- Untung, M., Mulyaningsih, & Wibisono, O. N. (2025). Revolutionizing public services: The transformative power of e-government in shaping efficient digital governance. *Journal of Information Systems Engineering and Management*, 10(54s), 614–621.